



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

VOL. 10 NO. 4 | OKTOBER - DESEMBER 2025

POLICY BRIEF

LESSONS LEARNED KEBIJAKAN NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA) INDIA
DAN PELUANG PENINGKATAN KERJA SAMA BIDANG PANGAN INDONESIA – INDIA

PENGUATAN TATA KELOLA UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGp) DI INDONESIA

DEWAN REDAKSI

PENGARAH

KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR

SYARIFAH NURHAYA

REDAKTUR

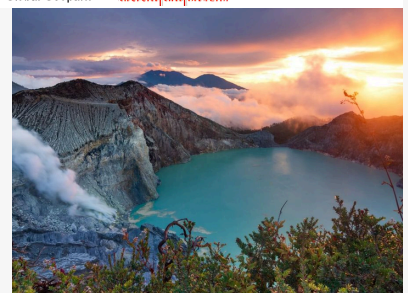
1. AHMAD MARUFI
2. JEPRI EDI
3. REINHARDT K
4. NALDO HELMYS

EDITOR

1. M. FATTAH H.
2. ALI SYARI'ATI
3. CUT NURY H. SABRY
4. KARIN ARAMITHA
5. HANIF FARHAN

SEKRETARIAT

1. WAHYU KUMORO
2. VIA FIDE ADITYA
3. NURUL UTAMI
4. NURMASELLA PANE



**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI, LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508

POLICY BRIEF

VOLUME 10 NO. 4 | OKTOBER - DESEMBER 2025

LESSONS LEARNED KEBIJAKAN NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA) INDIA DAN PELUANG PENINGKATAN KERJA SAMA BIDANG PANGAN INDONESIA – INDIA

Ringkasan Eksekutif

Salah satu *lesson learned* dari kebijakan Pemerintah India dalam menanggapi tantangan krisis pangan adalah implementasi [National Food Security Act \(NFSA\) 2013](#), yang menjamin pangan pokok bagi mayoritas penduduk, dengan didukung digitalisasi distribusi, serta penerapan program gizi POSHAN yang fokus pada status gizi dan kesehatan masyarakat, dan intervensi pasar. Pendekatan multi-sektoral dan penggunaan teknologi yang terdapat dalam NFSA dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.

Dalam rangka ketahanan pangan, kerja sama Indonesia–India memiliki potensi besar guna menjaga stabilitas pasokan. Beberapa potensi kerja sama termasuk perdagangan pada produk *edible oil* dan beras, alih teknologi pertanian dan kemitraan agribisnis, pertukaran pengetahuan dan kebijakan, pemberdayaan petani kecil dan penelitian dan pengembangan. Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu, antara lain, memanfaatkan Kerangka Kebijakan Regional **ASEAN–India Summit 2023** pada **Joint Statement on Strengthening Food Security**, untuk alih teknologi pertanian India dan juga mengadopsi pendekatan **multi-fase, multi-level governance, dan multi-sektor** dengan peran pemerintah Pusat tidak terlalu dominan agar tidak membebani APBN serta menghindari risiko politisasi.

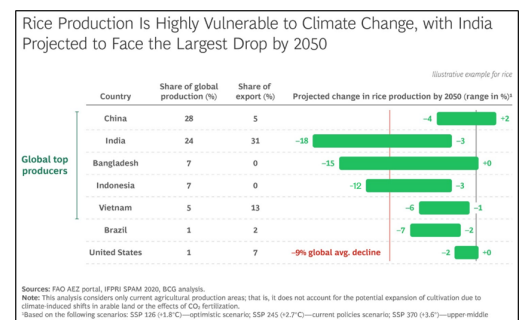
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dunia saat ini mengalami krisis pangan yang diperkirakan akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan global. Data dari FAO (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 733 juta orang mengalami kelaparan pada tahun 2023 (FAO, 2024). Di wilayah Asia—termasuk kawasan Indo-Pasifik—tingkat kelaparan tetap stabil di kisaran 8,1%, namun jumlah absolutnya sangat besar, yaitu sekitar 402 juta orang.

Gambar di samping menunjukkan proyeksi penurunan produksi beras global hingga pada tahun 2050. India, Bangladesh, dan Indonesia—yang secara kolektif menyumbang 40% produksi beras dunia—diperkirakan mengalami penurunan signifikan.

Masing-masing sebesar 18%, 15%, dan 12% (Unnikrishnan, Navarro, Maher, & Bande, 2025).



Gambar 1. Proyeksi Penurunan Produksi Beras hingga 2050

2. Indonesia dan India sebagai dua negara yang antara lain mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik.

- Keduanya masih bergantung pada impor pangan strategis. Selama Januari–Mei 2024, Indonesia mengimpor 2,2 juta ton beras, naik 165% dibandingkan tahun 2023 (Nugroho, 2024). Sementara itu, India mengimpor sekitar 2/3 kebutuhan minyak nabatinya, dengan nilai impor mencapai USD 15 miliar pada tahun fiskal 2023–24 (Reuters, 2024).
3. *Chapter* ini akan mengkaji bagaimana India memastikan ketahanan pangan nasionalnya melalui tinjauan kebijakan yang diterapkan dalam mengurangi dampak krisis pangan terhadap negara-nya. Salah satu kebijakan utama India yang akan ditelaah adalah *National Food Security Act* (NFSA) India tahun 2013 dan kebijakan lainnya.
 4. Selanjutnya, *chapter* ini akan menyampaikan rekomendasi peluang kerja sama Indonesia dengan India untuk bersama-sama mengantisipasi krisis pangan dan mendukung ketahanan pangan kedua negara dan di kawasan

Kerangka Ketahanan Pangan India

5. India telah memperluas akses pangan secara signifikan dan menjamin pangan pokok untuk 800 juta penerima manfaat atau lebih dari dua pertiga populasi India melalui Kebijakan ***National Food Security Act (NFSA) 2013*** (Thapar, 2025).
6. Kerangka Ketahanan Pangan India didasarkan pada NFSA, yang juga dikenal sebagai *Right to Food Act* (Undang-undang Hak Atas Makanan) (Rajya Sabha Secretariat, 2014). Beberapa pokok pen-ting dari NFSA adalah:
 - a. Cakupan dan Kelompok Penerima Manfaat.
NFSA memberikan hak legal kepada **75% populasi pedesaan** dan **50% populasi perkotaan** untuk menerima **5 kg pangan pokok per orang per bulan** melalui TPDS (*Targeted Public Distribution System*).
 - ***Antyodaya Anna Yojana (AAY)***—kelompok termiskin mendapat alokasi khusus sebesar **35 kg per rumah tangga per bulan** dengan harga bersubsidi yang sama.
 - b. Harga Subsidi dan Durasi
Pada tiga tahun pertama pelaksanaan, pemerintah menetapkan harga maksimal pangan pokok yang sangat terjangkau, yaitu beras sebesar ₹3/kg (₹1 = USD 0.017 tahun 2013) gandum ₹2/kg, dan gandum kasar atau millet sebesar ₹1/kg. Setelah periode tiga tahun tersebut berakhir, harga dapat disesuaikan oleh Pemerintah Pusat, namun dengan ketentuan bahwa penyesuaian tidak boleh melebihi ***Minimum Support Price (MSP)*** untuk gandum dan gandum kasar, serta ***Derived MSP*** untuk beras.
 - c. Reformasi PDS dan Digitalisasi
UU menekankan pentingnya reformasi PDS melalui digitalisasi, seperti penggunaan ***PoS (Point of Sale)*** dan portal seperti ***IM-PDS*** dan ***Annavitran***, menunjang sistem seperti ***One Nation One Ration Card (ONORC)***. Hal ini meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran, serta mempermudah portabilitas bagi pekerja migran.
 - d. Nutrisi dan Skema Terkait
Selain alokasi beras, gandum, dan gandum kasar, UU ini juga mencakup pengaturan beberapa program:
 - ***Mid-Day Meal Scheme (MDMS)*** dan ***Integrated Child Development Services (ICDS)*** untuk anak-anak dan ibu hamil/menyusui.
 - Maternity ***benefit*** (tunjangan kehamilan) dioperasionalkan lewat ***Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana*** sejak 2017.
7. Pada 2018, Pemerintah India meluncurkan program ***POSHAN Abhiyaan***—yang dimutakhirkan menjadi ***POSHAN 2.0*** pada 2021. Program ini fokus pada **status gizi** dan **kesehatan masyarakat**, terutama perempuan, ibu hamil, dan anak-anak.

Program ini bertujuan menurunkan angka **stunting, wasting, anemia, dan kekurangan gizi** melalui intervensi gizi, kesehatan, sanitasi, serta kampanye perubahan perilaku.

8. NFSA dan POSHAN saling berkaitan dan melengkapi. NFSA menjamin pangan pokok, sedangkan POSHAN fokus pada gizi seimbang dan keberagaman makanan. Subsidi beras/gandum bertujuan mencegah kelaparan, namun POSHAN melengkapinya dengan intervensi gizi. Program NFSA seperti ICDS dan MDMS juga menjadi instrumen utama pencapaian target POSHAN.
9. Meskipun dirancang sebagai instrumen kunci ketahanan pangan, pelaksanaan NFSA di India masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait efisiensi pengadaan dan ketergantungan pada beras dan gandum. Dominasi beras dan gandum dalam skema *procurement* NFSA, meski penting untuk menjamin ketersediaan, **mengorbankan keberagaman pangan**. Ketergantungan ini menurunkan fleksibilitas nutrisi dan memicu defisiensi gizi—terutama di daerah dengan konsumsi pangan kurang ideal (ORF, 2019). Selain itu, birokrasi dan ketergantungan sistem sentral dalam pengadaan menghambat respons cepat terhadap kebutuhan lokal.

Lessons Learned dari NFSA India

10. NSFA India memberikan beberapa pelajaran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. *Integrated, Multi-Sectoral Approach*
Ketahanan pangan—dalam konteks NFSA—bukan hanya persoalan agrikultur atau distribusi semata, melainkan membutuhkan **koordinasi lintas sektor** seperti kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Misalnya, inisiatif seperti POSHAN Abhiyaan dan POSHAN 2.0, yang menyatukan program-program seperti ICDS, *Mid-day Scheme*, program remaja, dan *crèche* di bawah payung terpadu, mencerminkan pendekatan

multisektoral dan hak atas pangan yang inklusif (UNICEF, 2025).

- b. Pemberdayaan Pemerintah Lokal dan Komunitas (Desentralisasi)
Pemerintah daerah dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam monitoring, pelaksanaan, dan solusi berbasis konteks lokal. Namun, studi di Odisha menunjukkan bahwa mekanisme seperti **community-based monitoring** kadang masih bersifat “tokenistik”—komite yang sebenarnya dikendalikan oleh petugas lapangan, bukan justru menguatkan suara masyarakat (Feruglio & Nisbett, 2018).
- c. Pemanfaatan Teknologi untuk Akuntabilitas dan Transparansi
Pemanfaatan **teknologi digital** seperti *e-PoS*, *Aadhaar seeding*, *Mera Ration App*, telah terbukti meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran, serta memastikan distribusi pangan bersubsidi lebih tepat sasaran (Hazarika & Oberoi, 2024). Selain itu, skema *One Nation, One Ration Card (ONORC)* memungkinkan pemegang kartu mendapat jatah pangan dari mana pun di India, dengan sistem *e-PoS* yang terintegrasi secara nasional. Sebanyak hampir 80 crore² penerima telah terlayani, dan transaksi miliaran kali telah terjadi (K, 2025).

Potensi Kerja Sama Indonesia – India di Bidang Ketahanan Pangan

11. Kerja sama Indonesia–India di bidang ketahanan pangan memiliki potensi besar yang dapat memperkuat stabilitas pasokan di kedua negara. Beberapa potensi kerja sama antar kedua negara termasuk:
 - a. *Edible Oils*
Pada Agustus 2025, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan *Indian Vegetable Oil Producers' Association (IVPA)* menandatangani perjanjian tiga tahun untuk **mengamankan pasokan minyak sawit ke pasar India**. Kesepakatan ini tidak hanya menekankan aspek perdagangan,

tetapi juga penerapan praktik berkelanjutan dan keterlibatan petani kecil, mengingat Indonesia merupakan pemasok utama minyak sawit bagi India (GAPKI, 2025).

b. Perdagangan Beras

Selain minyak sawit, kerja sama juga dapat diperluas ke sektor beras. India, sebagai salah satu produsen dan eksportir beras terbesar dunia, dapat membantu Indonesia yang meskipun menjadi produsen beras besar, tetap membutuhkan impor guna menjaga stabilitas harga domestik. Pemerintah Indonesia bahkan pernah mempertimbangkan impor **1 juta ton beras dari India pada 2025** untuk mengantisipasi penurunan produksi akibat keterlambatan musim tanam dan panen (Kurniawati, 2024).

c. Teknologi Pertanian dan kemitraan Agribisnis

Di luar komoditas utama, peluang kerja sama juga terbuka dalam bidang **teknologi pertanian**. Perusahaan *agritech* India dapat menawarkan solusi seperti penggunaan drone, irigasi berbasis AI, dan manajemen pertanian digital yang mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi. India juga berpotensi menjadi pemasok benih unggul dan *agrochemicals* bagi Indonesia. Lebih lanjut, kedua negara dapat menjajaki kemitraan di sektor agribisnis, termasuk *crop processing*, *post-harvest management*, dan pertanian organik untuk meningkatkan kualitas pangan serta mengurangi limbah.

d. Pertukaran Pengetahuan dan Kebijakan

Indonesia dan India dapat saling **membandingkan kerangka kebijakan pangan nasional dan sistem institusional dalam mengelola pasokan**. Hal ini relevan dengan komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas rantai pasok pangan global dan

memperkuat ketahanan pangan regional melalui jalur yang berkelanjutan dan inklusif (Info Sawit, 2025).

e. Pemberdayaan Petani Kecil

Pemberdayaan petani kecil dapat dilakukan melalui **pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam praktik pertanian modern**, didukung akses pembiayaan mikro agar mereka lebih mudah memperoleh modal. Selain itu, penerapan sistem sertifikasi berkelanjutan penting untuk meningkatkan daya saing produk, sementara transfer pengetahuan mengenai teknik budidaya, varietas unggul, hingga pengelolaan pascapanen akan membantu petani kecil meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan.

f. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dapat difokuskan pada **pengembangan varietas tanaman tahan iklim untuk menghadapi ketidakpastian cuaca**, disertai pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif terhadap alam. Upaya ini perlu didukung dengan penerapan sistem pertanian berkelanjutan serta inovasi untuk mitigasi perubahan iklim, misalnya melalui efisiensi penggunaan air dan energi. Selain itu, konservasi keanekaragaman hayati pertanian menjadi kunci untuk menjaga sumber genetik yang penting menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan

12. Pemanfaatan Kerangka Kebijakan Regional untuk Alih Teknologi Pertanian India

- Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam hubungan bilateral dengan India adalah mengamankan impor bahan pangan seperti beras, gandum, dan gula dari India. Dalam **ASEAN-India Summit 2023** di Jakarta, Indonesia mengusulkan

¹Istilah *crèche* sering muncul di program ICDS, yaitu layanan untuk anak balita termasuk makanan tambahan, imunisasi, pendidikan dini, dan penitipan anak di *anganwadi centres* (posyandu versi India).

²Crore adalah satuan sistem angka India. Crore masih banyak digunakan di Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Crore India sama dengan 100 lakh atau 10 juta.

Joint Statement on Strengthening Food Security (ASEAN, 2023).

Dokumen ini menekankan pentingnya kolaborasi menciptakan rantai pasok berkelanjutan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, yang sejalan dengan agenda kerja sama Indonesia-India di sektor pangan.

- Lebih luas, kerja sama ini juga terhubung dengan strategi “*Act East*” *Policy India*, yang menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan prioritas (RIS, 2025). Dalam kebijakan ini, Indonesia dipandang sebagai mitra kunci tidak hanya di bidang perdagangan dan konektivitas, tetapi juga dalam ketahanan pangan regional. Hal ini memperkuat posisi kedua negara sebagai pilar penting dalam membangun rantai pasok pangan yang tangguh dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik.
13. Identifikasi dan Penguatan Rantai Pasok Perdagangan Produk dan Jasa Pertanian Pada Tingkat Bilateral
- Hal ini meliputi pembangunan **infrastruktur cold chain**, pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien, penerapan standar-disasi kualitas dan keamanan pangan, serta penguatan teknologi pasca-panen. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berperan penting dalam membuka akses pasar, memperjuangkan standardisasi produk di forum bilateral, serta mendorong terbentuknya perjanjian teknis dan mekanisme fasilitasi perdagangan agar produk pertanian kedua negara dapat bergerak lebih lancar.
14. Mobilisasi Jejaring Petani dan Penguatan *People-to-People Contact*
- Penguatan *farmer-to-farmer networks* yang menekankan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran lintas negara secara *bottom-up*. Melalui jejaring ini, para petani dari kedua negara dapat saling berbagi praktik terbaik, memperluas kapasitas teknis, dan membangun solidaritas komunitas lintas batas. Proses ini sejalan dengan semangat

people-to-people contact, karena mendorong interaksi langsung antar-warga yang memperkuat ikatan sosial, memperdalam saling pengertian, dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap isu pangan.

- Kemlu dapat berperan penting sebagai fasilitator diplomasi yang menghubungkan jejaring masyarakat sipil, organisasi petani, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal di Indonesia dan India. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya berhenti pada tataran pemerintah (*G to G*), tetapi juga hidup dalam hubungan antar masyarakat (*P to P*) yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
15. Penguatan Jejaring Produksi Pengetahuan melalui Pengembangan *Joint Agricultural Innovation Ecosystem*
- Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pangan, sebagaimana ditunjukkan India melalui NFSA. Praktik ini dapat menjadi rujukan bagi kerja sama Indonesia-India, khususnya dalam mengembangkan *joint agricultural innovation ecosystem* yang memungkinkan pemantauan berbasis data terbuka, pelacakan rantai pasok lintas negara, dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Dalam hal ini, Kemlu berperan strategis sebagai fasilitator diplomasi digital yang menghubungkan aktor pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal.
16. Pendekatan Desentralisasi
- Indonesia dapat mengadopsi pendekatan **multi-fase, multi-level governance, dan multi-sektor**. Peran Pemerintah Pusat tidak perlu terlalu dominan agar tidak membebani APBN serta menghindari risiko politisasi. Pembelajaran dari **MDMS di India** menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditopang oleh pemberian ruang bagi pemerintah daerah untuk menguji berbagai model *free lunch scheme*. Dari model-model lokal tersebut kemudian lahir model nasional yang lebih efektif dan kontekstual.

- Skema bantuan pangan seperti **POSHAN** di India menargetkan keluarga kurang mampu dan wilayah dengan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HDI) rendah**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan prioritas bantuan, Indonesia perlu mempertimbangkan standar IPM di setiap daerah agar distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2023, September 07). *ASEAN-India Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises*. Diambil kembali dari <https://asean.org/asean-india-joint-leaders-statement-on-strengthening-food-security-and-nutrition-in-response-to-crises/>
- FAO. (2024). *Hunger numbers stubbornly high for three consecutive years as global crises deepen: UN report*. Rio de Janeiro: FAO News and Media. Diambil kembali dari <https://www.fao.org/newsroom/detail/hunger-numbers-stubbornly-high-for-three-consecutive-years-as-global-crises-deepen-un-report/>
- Feruglio, F., & Nisbett, N. (2018). The challenges of institutionalizing community-level social accountability mechanisms for health and nutrition: a qualitative study in Odisha, India. *BMC Health Services Research*, 1-13. doi:10.1186/s12913-018-3600-1
- GAPKI. (2025, Agustus 2025). *Palm Oil Power Move: Indonesia & India Sign 3-Year Pact to Secure Food, Fortunes, and the Future*. Diambil kembali dari <https://gapki.id/en/news/2025/07/28/palm-oil-power-move-indonesia-india-sign-3-year-pact-to-secure-food-fortunes-and-the-future/>
- Hazarika, D., & Oberoi, R. (2024). Augmenting Use of Technology in Implementation of NFSA-2013: Documenting Evidence From Assam. *Indian Public Policy Review*, 83-104. doi:<https://doi.org/10.55763/ippr.2024.05.04.004>
- Info Sawit. (2025, Agustus 01). *Indonesia Targets Palm Oil Exports to India to Reach 5 Million Tons by 2025, Supported by Tariff Reductions and Seed Collaboration*. Diambil kembali dari <https://en.infosawit.com/news/16150/indonesia-targets-palm-oil-exports-to-india-to-reach-5-million-tons-by-2025-supported-by-tariff-reductions-and-seed-collaboration>
- K, R. (2025, Agustus 13). *One Nation One Ration Card Scheme Explained- What Is It, Benefits, Implementation, Progress*. Diambil kembali dari <https://cleartax.in/s/one-nation-one-ration-card/>
- Kurniawati, D. (2024, Oktober 29). *Indonesia considers importing 1 mln tons of rice from India next year, minister says*. Diambil kembali dari <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-considers-importing-1-mln-tons-rice-india-next-year-minister-says-2024-10-29/>
- Nugroho, R. A. (2024, Juni 19). *Impor Beras RI Meroket 165% Jadi 2,2 Juta Ton di Awal 2024*. Diambil kembali dari <https://www.cnbciindonesia.com/news/20240619124826-4-547451/imp-or-beras-ri-meroket-165-jadi-22-juta-ton-di-awal-2024>
- ORF. (2019, Juni 15). *Nutritional security and efficient markets necessary for NFSA's success?* Diambil kembali dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/nutritional-security-efficient-markets-necessary-nfsa-success>
- Rajya Sabha Secreariat. (2014). *Compendium on Parliamentary Enactments*. New Delhi: The Secretary-General, Rajya Sabha.
- Reuters. (2024, Oktober 04). *India aims to double edible oil output to trim reliance on imports*. Diambil kembali dari <https://www.reuters.com/markets/commodities/india-aims-double-edible-oil-output-trim-reliance-imports-2024-10-03/>
- RIS. (2025). *A Decade of Act East Policy: Achievements, Challenges, and the Road Ahead*. New Delhi: India Habitat Centre. Diambil kembali dari https://www.ris.org.in/sites/default/files/Publication/A_Decade_of_Act_East_Policy_Achievements_Challenges_and_the_Road_Ahead.pdf
- Thapar, M. (2025, Agustus 11). *National Food Security Act (NFSA) 2013- Hunger-free India in making*. Diambil kembali dari <https://www.impriindia.com/insights/policy-update/national-food-security-act-2013/>
- UNICEF. (2025, Januari 15). *Safeguarding nutrition through multi-systems action in India*. Diambil kembali dari <https://knowledge.unicef.org/health/resource/safeguarding-nutrition-through-multi-systems-action-india>
- Unnikrishnan, S., Navarro, A., Maher, H., & Bande, C. (2025, Mei 01). *Building Resilience in Agrifood Supply Chains*. Diambil kembali dari <https://www.bcg.com/publications/2025/building-resilience-in-agrifood-supply-chains>

**KUESIONER KEMANFAATAN *POLICY BRIEF* BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN LUAR NEGERI**



**SURVEY KUALITAS PELAYANAN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
LUAR NEGERI**



PENGUATAN TATA KELOLA *UNESCO GLOBAL GEOPARK* (UGGp) DI INDONESIA

Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah memiliki 12 situs Geopark yang terdaftar pada UNESCO Global Geopark (UGGp). Pengembangan Geopark yang diintegrasikan dengan RPJMN 2025 – 2029 dan RPJPN 2025 – 2045 menunjukkan pengakuan penting Geopark bukan sekadar kawasan konservasi geologi, tetapi juga model pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Namun, tata kelola Geopark di Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan mulai dari regulasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga kerja sama internasional. Diperlukan langkah-langkah strategis agar tata kelola Geopark dapat menjadi lebih kuat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Indonesia saat ini memiliki 12 *UNESCO Global Geopark* (UGGp) yang tersebar dari ujung barat hingga timur Nusantara. Pengembangannya telah ditempatkan sebagai target strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Langkah ini menandakan pengakuan penting terhadap Geopark bukan sekadar kawasan konservasi geologi tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.
2. Geopark merupakan sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi

(*Geoheritage*), Keanekaragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Pasal 1).

3. Geopark Indonesia kini berada di persimpangan strategis. Di satu sisi, Geopark menjadi arena pelestarian alam, pendidikan publik, promosi budaya, dan pembangunan ekonomi lokal. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan seperti belum optimalnya tata kelola Geopark, baik dari segi kelembagaan, pendanaan, perencanaan spasial, hingga jejaring global. Tantangan ini menghambat pemanfaatan Geopark secara maksimal sebagai instrumen pembangunan dan diplomasi internasional.

¹ UNESCO, “UNESCO Global Geoparks,” 2025, <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/about>.

B. Pengamatan

4. Saat ini terdapat 229 UGGp di 50 negara. Di Indonesia terdapat 12 UGGp yaitu di Batur (Bali), Belitung (Bangka Belitung), Ciletuh-Palabuhanratu (Jawa Barat), Gunung Sewu (Jawa Timur), Ijen (Jawa Timur), Kebumen (Jawa Tengah), Maros Pangkep (Sulawesi Selatan), Merangin Jambi (Jambi), Meratus (Kalimantan Selatan), Raja Ampat (Papua Barat Daya), Rinjani-Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Kaldera Toba (Sumatera Utara).



Peta Penyebaran Lokasi UGGp Indonesia.
Sumber: Google Maps, 2025; diolah PSKM

5. Status UGGp tidak permanen: diberikan status *green card* apabila dalam tata kelolanya memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan UNESCO serta berlaku 4 (empat) tahun; status *yellow card* apabila tidak lagi memenuhi keseluruhan kriteria dan diberikan waktu perbaikan 2 (dua) tahun. Apabila dalam 2 tahun tidak mampu memenuhi kriteria, status UGGp dicabut (*red card*).
6. Merujuk pada mandat UNESCO dan praktik terbaik internasional, keberadaan Geopark diharapkan dapat menjalankan lima peran utama berikut:
 - a. Konservasi warisan geologi dan alam: melindungi situs *Geoheritage* sebagai kawasan lindung geologi.
 - b. Pendidikan dan literasi kebumih: meningkatkan kesadaran masyarakat akan dinamika planet Bumi dan mitigasi bencana.
 - c. Pembangunan ekonomi lokal: mendorong geowisata, UMKM, dan geo-
- d. Pelestarian budaya dan identitas lokal: menghidupkan kembali budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik kawasan.
- e. Diplomasi global dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): menjadikan Geopark sebagai wajah diplomasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
7. UGGp dapat menghasilkan dampak ekonomi signifikan, termasuk peningkatan jumlah wisatawan, pendapatan daerah, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sebagai contoh, Geopark Lesvos di Yunani mampu mendatangkan 90 ribu wisatawan setiap tahunnya, dan mempekerjakan 35 penduduk lokal secara langsung serta ratusan lapangan kerja baru yang tercipta secara tidak langsung. Lesvos adalah sebuah pulau di Yunani yang dapat ditempuh sekitar 1 jam dengan pesawat atau 13 jam dengan kapal feri dari Athena.
8. Geopark juga merupakan instrumen *nation branding*. Melalui UGGp, Indonesia dapat mengangkat wajah keberagaman geologi dan budaya ke panggung internasional. Peran aktif dalam forum multilateral Geopark, seperti *Global Geoparks Network* (GGN), *Asia Pacific Geoparks Network* (APGN), dan *International Geoscience and Geoparks Programme* (IGCP), dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemimpin *Global South* dalam isu pembangunan berkelanjutan.
9. GGN telah menyusun *GGN Long-Term Strategy 2025 – 2035: Connecting Earth, Shaping Tomorrow* dengan 12 prioritas strategis kunci yang disusun dalam 4 pilar strategis:⁴
Pilar 1: *Preserving Our Earth, Environment and Resources*
 - 1) Adaptasi Perubahan Iklim – Peta Jalan Resiliensi
 - 2) Perlindungan dan Konservasi *Geoheritage*, *Geodiversity*, *Biodiversity*, dan Sumber Daya
 - 3) Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Air

² N. Zouros, "Global Geoparks Network and the New UNESCO Global Geoparks Programme," *Bulletin of the Geological Society of Greece* L (20216): 284–91.

³ Neda Torabi Farsani, Celeste Coelho, and Carlos Costa, "Geotourism and Geoparks as Novel Strategies for Socio-Economic Development in Rural Areas," *International Journal of Tourism Research* 13 (2011): 68–81.

⁴ Global Geoparks Network, "GGN Long-Term Strategy 2025-2035: Connecting Earth, Shaping Tomorrow," 2025, 6–9

- 4) Perlindungan Ekosistem Samudra dan Kelautan.

Pilar 2: *Strengthening Communities: Fostering Inclusion and Resilience*

- 5) Promosi Geoparks sebagai Implementasi SDGs
- 6) Penguatan Masyarakat Lokal dan Penguatan Manajemen Geopark
- 7) Mitigasi Bencana Alam

Pilar 3: *Optimizing GGN, Building Capacity, Leadership, and Global Impact*

- 8) Pembangunan Kapasitas, Penguatan Keterampilan dan Kepakaran Lintas GGN
- 9) Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Organisasi GGN

Pilar 4: *Strengthening Global Partnerships for Sustainable Development*

- 10) Jaminan Mutu dalam IGGP
- 11) Penguatan Kolaborasi dengan UNESCO Site Designations
- 12) Penguatan Kerja Sama Internasional.

10. Terdapat sejumlah tantangan Geopark Indonesia antara lain:

- a. **Aspek kelembagaan dan regulasi.** Saat ini kejelasan struktur dan kewenangan Badan Pengelola Geopark (BP Geopark) secara nasional maupun daerah belum ada. Perpres Nomor 9 Tahun 2019 masih dalam proses revisi. Peraturan teknis Kementerian Dalam Negeri terkait Nomenklatur, kodifikasi, dan penganggaran BP Geopark juga belum ada.
- b. **Kapasitas sumber daya manusia dan pembiayaan.** Jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen Geopark, interpretasi geologi, dan promosi geowisata masih terbatas. Sedangkan skema pendanaan belum berkelanjutan. Iuran tahunan ke UNESCO sekitar IDR 342 juta per tahun untuk 12 UGGp masih ditanggung oleh masing-masing Geopark, bukan oleh Pemerintah Pusat.
- c. **Perencanaan spasial dan sinergi pembangunan.** Geopark belum sepenuhnya terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota. Sementara itu, infrastruktur dasar seperti aksesibilitas, informasi publik,

dan amenitas juga masih terbatas.

- d. **Jejaring internasional dan peran global.** Saat ini belum ada wakil Indonesia dalam *Council UGGp* dan hanya terdapat satu asesor UGGp dari Indonesia. Di samping itu, peran diplomasi luar negeri melalui UNESCO dan *Asia Pacific Geopark Network* (APGN) masih belum optimal.
11. Geopark Kaldera Toba merupakan UGGp terbesar di Asia Tenggara. Geopark ini mengusung narasi geologi yang sangat kuat: letusan supervulkan yang membentuk kaldera raksasa dan danau terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, kelembagaan Toba masih menghadapi tantangan fragmentasi: (i) Badan Pengelola belum memiliki dasar hukum yang kuat dan berada di bawah koordinasi dinas provinsi; (ii) tantangan integrasi dengan proyek-proyek strategis nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba, belum sepenuhnya harmonis, mengakibatkan ketimpangan antara *branding* dan kapasitas manajemen di lapangan.
12. Sebaliknya, Geopark Kebumen memberikan model pengelolaan yang lebih luwes dan berbasis komunitas. Kebumen menjadi lokomotif promosi literasi kebumian melalui sekolah-sekolah, pusat edukasi, dan UMKM geo-produk. Hal ini didukung oleh kepala daerah dan semangat kolaboratif non-ASN. Kebumen menunjukkan komitmen lokal, jejaring universitas, dan model partisipatif dapat membangun daya saing Geopark dari bawah ke atas, terlepas dari belum adanya dukungan anggaran yang tetap dari Pemerintah Pusat. Model Geopark seperti ini dinilai lebih berkelanjutan karena menciptakan rasa kepemilikan dari warga lokal terhadap *Geoheritage* yang mereka miliki.
13. Beberapa negara telah mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan Geopark yang mapan dan dapat dijadikan rujukan oleh Indonesia.
 - a. **Tiongkok** memiliki 49 UGGp dan merupakan jumlah terbanyak di dunia. Sistem pengelolaannya sangat terpusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sumber Daya Alam menetapkan struktur kelembagaan Geopark dengan dukungan anggaran publik yang signifikan. Setiap Geopark di Tiongkok

dikelola oleh unit khusus berstatus badan hukum tetap dan terintegrasi dengan sistem Pemerintah Daerah. Tiongkok juga memiliki sistem audit dan evaluasi tahunan yang ketat untuk setiap Geopark, termasuk indikator konservasi, pengunjung, dan kontribusi ekonomi.

- b. **Jepang** memiliki 10 UGGp dan mengadopsi pendekatan partisipatif yang didukung regulasi yang kuat. Setiap Geopark memiliki pengelola berbasis komunitas yang disebut *Council*, terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Council* memiliki otoritas untuk menyusun rencana strategis Geopark dan memperoleh dukungan teknis serta fiskal dari Pemerintah Pusat melalui *Japan Geopark Committee* (JGC). Pelibatan universitas lokal sebagai pusat riset dan edukasi Geopark menjadi salah satu kunci keberhasilan Jepang. Jepang juga menjaga regenerasi asesor Geopark berstandar internasional.
 - c. **Eropa** memiliki tata kelola Geopark yang sangat terhubung dengan kebijakan pembangunan wilayah dan konservasi. Geopark Prancis seperti Massif de Bauges dikelola badan publik antar-komunal (semacam Badan Usaha Milik Daerah/BUMD regional) dan memiliki akses langsung terhadap dana Uni Eropa, termasuk *European Regional Development Fund* (ERDF). Geopark Italia dibangun atas kolaborasi antar lembaga, seperti badan regional, organisasi konservasi, dan komunitas lokal, yang bertujuan untuk melestarikan *Geoheritage* melalui inovasi *Geofood*. Pengelolaan UGGp di Eropa juga memiliki dukungan kuat melalui *European Geoparks Network* (EGN) yang secara aktif memberikan pelatihan, pertukaran pengalaman, dan asistensi teknis lintas negara.
14. Dari perbandingan di atas, penguatan BP Geopark di Indonesia dapat diarahkan pada dua model: (i) berbasis otoritas publik formal seperti di Tiongkok dan Eropa; atau (ii) berbasis konsorsium *multistakeholder* seperti di Jepang. Kombinasi keduanya dengan adaptasi lokal akan memperkuat efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan tata kelola Geopark di Indonesia.

C. Rekomendasi Strategi Kebijakan

15. Penguatan tata kelola UGGp di Indonesia dapat dilakukan dengan:
 - a. **Penguatan regulasi dan kelembagaan tata kelola** melalui: (i) percepatan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019; dan (ii) penetapan standar kelembagaan BP Geopark, termasuk struktur organisasi dan tugas pokok.
 - b. **Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan** melalui: (i) pelatihan bagi pengelola Geopark; (ii) sertifikasi kompetensi pengelolaan Geopark dan pelatih geowisata; dan (iii) pendampingan penyusunan Rencana Induk dan *dossier* UGGp.
 - c. **Pendanaan berkelanjutan** melalui: (i) penganggaran iuran tahunan UGGp melalui APBN, dikoordinasikan oleh Kemlu; (ii) pemanfaatan skema *Green Climate Fund* (GCF), *Global Environment Facility Trust Fund* (GEF), dan kemitraan bilateral; dan (iii) skema insentif fiskal untuk investasi hijau di kawasan Geopark.
 - d. **Integrasi perencanaan dan infrastruktur** melalui: (i) integrasi Geopark dalam RTRW dan RPJMD kabupaten/kota; (ii) pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di kawasan Geopark; dan (iii) pengembangan pusat informasi geologi dan amenitas pendukung (CHSE).
 - e. **Diplomasi Geopark dan jejaring internasional** dengan mendorong fungsi Geopark sebagai inkubator *nation branding* baru dan memperkuat diplomasi keilmuan, budaya, dan lingkungan di panggung internasional.
 - f. **Pengelolaan pariwisata Geopark** melalui: (i) pengaturan jumlah kunjungan wisatawan; (ii) pengaturan aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisatawan; (iii) manajemen akses mobilitas wisatawan termasuk dengan memprioritaskan transportasi rendah emisi menuju lokasi; (iv) pelaksanaan prinsip-prinsip ekowisata; dan (v) menggunakan pendapatan dari sektor pariwisata yang dihasilkan Geopark untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.
 - g. **Perlindungan kelompok rentan.** Penguatan tata kelola Geopark perlu memastikan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, seperti petani

dan nelayan kecil yang bisa terdampak perubahan nilai lahan dan perkembangan pariwisata.

16. Geopark bukan semata label prestisius, tetapi instrumen pembangunan berbasis komunitas strategis. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat lokal untuk menjadikan Geopark sebagai pengungkit kesejahteraan dan wajah diplomasi Indonesia. Dengan penguatan tata kelola, Indonesia tidak hanya menjaga warisan geologinya, tetapi juga membangun masa depan yang berakar pada identitas, ilmu pengetahuan, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Farsani, Neda Torabi, Celeste Coelho, and Carlos Costa. "Geotourism and Geoparks as Novel Strategies for Socio-Economic Development in Rural Areas." *International Journal of Tourism Research* 13 (2011): 68–81.

Global Geoparks Network. "GGN Long-Term Strategy 2025-2035: Connecting Earth, Shaping Tomorrow," 2025.

Permana, Rama. "Taman Bumi Bertambah, Bagaimana Menjaganya?" *Kompas*, September 23, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/taman-bumi-bertambah-bagaimana-menjaganya>.

UNESCO. "UNESCO Global Geoparks," 2025. <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/about>.

Zouros, N. "Global Geoparks Network and the New UNESCO Global Geoparks Programme." *Bulletin of the Geological Society of Greece* L (2016): 284–91.

⁵ Rama Permana, "Taman Bumi Bertambah, Bagaimana Menjaganya?," *Kompas*, September 23, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/taman-bumi-bertambah-bagaimana-menjaganya>.